

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini adalah jurnal dengan judul Peran BMT dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bantul Jaka Sriyana *Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta*. Kesimpulan Peran BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq sedekah dan waqaf. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan. Dengan menggunakan dana ZISWAF ini, BMT menjalankan produk pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

Kegiatan sosial BMT ini dapat disebut sebagai upaya proteksi atau jaminan sosial yang dapat menjaga proses pembangunan masyarakat miskin secara signifikan, Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya.

Jurnal dengan judul Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan Irsyad Andriyanto STAIN Kudus. Dalam Islam upaya

pengawasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan profesional adalah Rumah Zakat Indonesia (RZI).

Jurnal dengan judul Fenomena kemiskinan di Indonesia ( akar masalah dan alternatif solusinya. Mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pada konsep pemberdayaan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak berdaya (powerless) agar mampu (berdaya) baik secara fisik, mental dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan sosial hidupnya. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai aktor yang mempunyai peran penting untuk mengatasi masalahnya.

Jurnal Penanggulangan kemiskinan melalui Pendekatan kelembagaan. Menurut penulis, penanggulangan kemiskinan, menurut penulis didasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut: pertama, sistematis yaitu mengintegrasikan ekonomi orang miskin dengan ekonomi nasional. Kedua, bersifat partisipatoris, berwawasan lingkungan, memperhatikan jender, dan berorientasi pada upaya untuk secara langsung menanggulangi

masalah kemiskinan. Ketiga, didukung oleh gerakan sosial yang berskala luas. Adapun variable program menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut. Salah satu program yang perlu dipertimbangkan adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis klaster industri. Melalui program ini diharapkan setiap kabupaten/kota di Indonesia menetapkan satu produk atau jasa unggulan.

Jurnal Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia *Roni Ekha Putera* tentang analisis program-program penanggulangan kemiskinan pemberdayaan masyarakat Indonesia di penelitian tersebut peneliti menggunakan dan memperdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan program UKM dan membantu dalam pemasaran dalam hasil UKM masyarakat tersebut.

Yang membedakan penelitian ini dengan tinjauan pustaka adalah program di BMT serta tempat peneltian. Program dalam pengentasan kemiskinan.fokus kajian yaitu peran BMT dalam mengentas kemiskinan, peran zifwaf dan sosial lainnya di BMT Arta Amanah Sanden Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1 Data Penelitian Terdahulu

Judul	Hasil
Jaka Sriyana, 2013. Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul.	Kesimpulan Peran BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq sedekah dan waqaf.
Irsyad Andriyanto, 2011. Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan.	Kesimpulan dalam Islam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat.
Amin. Fenomena Kemiskinan di Indonesia (Akar Masalah dan Alternatif Solusinya).	Kesimpulan dalam mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang menyeluruh (comprehensif), sehingga dapat dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih menekankan pada konsep pertolongan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menolong yang lemah atau tidak

<p>Adi Susila, 2009. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kelembagaan.</p>	<p>berdaya. Menurut penulis penanggulangan kemiskinan didasarkan pada nilai-nilai sebagai berikut: pertama, sistematis yaitu mengintegrasikan ekonomi orang miskin dengan ekonomi nasional. Kedua, bersifat partisipatoris, berwawasan lingkungan, memperhatikan jender, dan berorientasi pada upaya untuk secara langsung menanggulangi masalah kemiskinan.</p>
<p>Roni Ekha Putera, 2007. Analisis terhadap program –program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.</p>	<p>Kesimpulan Pada penelitian terdahulu penelitimenggunakan danmemperdayakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan program UKM dan membantu dalam pemasaran dalam hasil UKM masyarakat tersebut.</p>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Peran**

#### **a. Peran**

Definisi peran dijelaskan oleh pakar sosiologi yaitu Soekanto mengatakan bahwa peran adalah sebagai Peranan (role) yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup> Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran yang melekat dalam diri seseorang memungkinkan ia mengekspresikan emosinya dan memperlihatkan eksistensinya. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat<sup>2</sup>

Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut. (1) meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (2) merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>3</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Peran**

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta : CV Rajawali, 2012)

<sup>2</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)

<sup>3</sup>*Ibid*; hal 18

Jenis-Jenis peran berasal dari pola-pola pergaulan hidup yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa hal, antara lain:

- 1) Peran yang harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- 2) Peran yang melekat pada individu-individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- 3) Peran yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- 4) Peran yang apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.<sup>4</sup>

### **c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.<sup>5</sup>

Perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas yang mendukung faktor tersebut bagi peran individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peran. Lembaga-

---

<sup>4</sup>*Ibid*;hal 18

<sup>5</sup>*Ibid*;hal 18

lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peran.<sup>6</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Kemiskinan

### a. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk yang bersangkutan untuk mencapai atau memenuhi standar hidup minimum tertentu (Kamaluddin, 1998). Ketidakmampuan seseorang atau penduduk didalam memenuhi kebutuhan hidup minimum tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor penyebabnya. Dilihat dari aspek penyebab kemiskinan, maka kemiskinan itu sendiri penyebabnya selain bersifat alamiah dan kultural juga dapat bersifat struktural.<sup>7</sup>

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>8</sup>Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan

---

<sup>6</sup>*Ibid*;hal 18

<sup>7</sup>Bank dunia

<sup>8</sup>Michael P.Todaro & Stephen C.Smith,*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 220

dasar gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Kemiskinan dapat di lihat dari 2 sisi yaitu kemiskinan absolut di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan secara absolut di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua kemiskinan relatif yaitu pangsa pendapatan nasional yang di terima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif di tentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang di tetapkan masyarakat setempat. Kemiskinan relatif amat erat kaitanya dengan masalah distribusi pendapatan.<sup>10</sup>

Kemiskinan absolut adalah kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan.<sup>11</sup>

Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 221-222

<sup>10</sup>Mudrajad kuncoro, *Dasar-dasar ekonomika pembangunan*(Yogyakarta: Upp Stimik Ykpn, 2010), hal. 57

<sup>11</sup>Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*(Jakarta:PTAsdi Mahasatya, 2002) cet.1, hal. 34

Menurut Nasikun kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan “Kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru.

Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkan tarat kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya, sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Pada masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan hanya merupakan masalah sosial, karena mereka menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan, sehingga tidak ada usaha untuk mengatasinya.

Mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya, faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka

telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan. Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi problema sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan. Tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, seseorang dianggap miskin tidak memiliki radio, televisi atau mobil, sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya. Dengan demikian persoalannya mungkin menjadi lain yaitu tidak adanya pembagian kekayaan yang merata.<sup>12</sup>

b. Ukuran kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Berdasarkan data statistic (2006), garis kemiskinan selama Maret 2007-Maret 2008, garis kemiskinan naik sebesar 9,56persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2007-Maret 2008, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks

---

<sup>12</sup>Amin, *Fenomena kemiskinan di indonesia(akar masalah dan alternatif solusinya)*,Jurnal, hal.

Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,99 pada Maret 2007 menjadi 2,77 pada Maret 2008. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,84 menjadi 0,76 pada periode yang sama. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.<sup>13</sup> Kemiskinan dalam persepektif islam Menurut pandangan islam tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup ditengah masyarakat islam sekalipun dalam al-dhimmah(warga negara non islam) menderita lapar,tidak berpakaian, tidak bertempat tinggal dan membujang.<sup>14</sup>

Salah satu bentuk penganiayaan manusia terhadap dirinya yang melahirkan kemiskinan adalah pandanganya yang keliru tentang kemiskinan. Karena itu langkah pertama yang dilaksanakan oleh al-quran adalah meluruskan persepsi yang keliru itu. Banyak orang yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah sarana penyucian diri, pangangan ini bahkan masih di anut oleh sebagian masyarkat hingga kini.<sup>15</sup>

Dalam konteks penjelasan pandangan al-quran tentang kemiskinan ditemukan sekian banyak ayat-ayat al-quran yng memuji kecukupan, bahkan al-quran mengajurkan untuk memperoleh kelebihan atau kekayaan atau kecukupn di antaranya: Apabila telah selesai shalat(jum'at) maka bertebarlah di bumi dan carilah fadhi(kelebihan) dan Allah (q.s.al-jum'ah 62:10). Disisi lain al-quran juga telah mengecam mereka yang mengharamkan hiasan duniawi yang diciptakan oleh allah. Meskipun demikian islam tidak menjadikan banyaknya harta sebagai

---

<sup>13</sup>Badan Pusat Statistik (BPS, 2009)

<sup>14</sup>Amin, *Fenomena kemiskinan di indonesia(akar masalah dan alternatif solusinya)*,Jurnal, hal. 2

<sup>15</sup>Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*(Jakarta:PTAsdi Mahasatya, 2002) cet.1, hal. 35

tolak ukur kekayaan, karena kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan kepuasannya.

Dalam rangka mengetaskan kemiskinan al-quran mengajukan tiga hal pokok di antaranya.

- 1) Kewajiban setiap individu tanggung jawab individu, kerja dan usaha merupakan cara pertama yang di tekankan dalam al-quran oleh karena itu manusia harus senantiasa rajin dan semangat untuk menfkahi dirinya berserta semua yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Tanggung jawab orang lain atau sesama manusia dalam hal ini al-quran mengajurkan untuk menyumbangkan sekarela dan menekankan keinsafan pribadi, dalam hal ini menyumbangkan di sini bermaksud kewajiban berzakat yang merupakan kewajiban bagi yang meminta atau yang tidak namun membutuhkan bantuan.
- 3) Tanggung jawab pemerintah, Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak perorangan,tanah, atau perdagangan maupun pajak tambahn lainnya yang di tetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi. Dengan begini kemiskinan yang ada di indonesia insyaallah akan berkurang dan pemerintah juga harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi para fakir miskin.<sup>16</sup>

### 3. Tinjauan *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT)

---

<sup>16</sup>Jaka Sriyana &Fitri Raya,*Peran Bmt Dalam Mengatasi KemiskinanDi Kabupaten Bantul*(Yogyakarta: UII, 2013), *Jurnal*, Vol. 7, No. 1, hal. 31

Baitul Maal at-Tamwil (BMT) terdiri dua istilah yaitu baitulmaal yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit seperti zakat, infak, sedekah. Serta baitutamwil yang berfungsi menyalurkan dan mengumpulkan dana komersial. Badan hukum BMT adalah koperasi, sehingga sering disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>17</sup> Pada dasarnya, BMT yang dibawah peraturan syariah tidak hanya bergerak pada keuntungan, tetapi juga bergerak dalam bidang social. BMT juga tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi saja tetapi juga mementingkan aspek syariah dimana dalam penerapannya dilandasi prinsip syariah. Untuk penggunaan dan penerapan produk dengan akad berdasarkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang telah dibuat dan di sah kan.<sup>18</sup> BMT adalah lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat bawah dan kecil, yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. BMT berintikan dua kegiatan usaha yang mencakup baitul mal dan baitul tanwil.

BMT sebagai baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang berasal dari zakat, infak dan sedekah. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (mustahik) zakat, sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan manajemen keuangan modern. Dalam mengelola dana ZIS dan wakaf ini, BMT tidak mendapatkan keuntungan finansal, karena hasil zakat tidak boleh dibisniskan BMT.<sup>19</sup> Sedangkan BMT sebagai baitul tanwil adalah lembaga (institusi) keuangan umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan

---

<sup>17</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*(Jakarta:Salemba Empat,2009), hal. 21

<sup>18</sup>Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM,2007). Hal. 24

<sup>19</sup>M. Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media,2006), cet. , hal. 1

menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Dengan demikian, selain menghimpun dana dari masyarakat, melalui investasi/tabungan, kegiatan Baitul Tanwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat, terutama pengusaha kecil. Selain unit simpan pinjam, BMT juga bisa secara langsung bergerak di bidang usaha sektor riil, seperti toko serba ada, peternakan, perikanan, jasa wartel, ekspor impor, leveransir, kontraktor dan sebagainya.

BMT sebagai lembaga yang menjadi model koperasi syari'ah, merupakan basis strategi gerakan koperasi di Indonesia.<sup>20</sup> Badan hukum BMT dalam hukum perundang-undangan di Indonesia yaitu koperasi. Walaupun pada dasarnya prinsip dan sistem operasional BMT dan koperasi berbeda. BMT lebih mengedepankan prinsip syariah. Sehingga, diharapkan kedepannya BMT akan mengajukan dan melegalkan badan hukum untuk BMT tersebut, karena bagaimanapun BMT dan koperasi berbeda dalam sistem operasionalnya.<sup>21</sup>

a. Prinsip BMT

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya prinsip syariah dan muamalah islam dan kenyataan dan praktiknya.
- 2) Keterpaduan yakni nilai spiritual dan moral menjadi dasar dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis sesuai syariah sehingga pada pelaksanaannya efektif dan efisien dengan akhlak mulia. Keterpaduan ini menggabungkan etika, ketrampilan, moral dan pengetahuan yang sesuai dengan syariah.
- 3) Kekeluargaan, yakni mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, ini juga harus ditanamkan pada setiap pegawai dan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal.2

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal.2

semua yang terlibat dalam operasional BMT. Dengan kekeluargaan ini akan menumbuhkan rasa saling melindungi dan bertanggung jawab.

- 4) **Kebersamaan**, bersama dalam mencapai tujuan dengan sikap dan visi serta misi yang sama antara pengurus, pengelola serta karyawan. Hal ini akan membuat kesejahteraan dan akan membuat mereka dapat memperbaiki atau meningkatkan ekonomi dan sosial.
- 5) **Kemandirian**, berusaha meminimalkan mendapat dan mengharapkan bantuan dari pihak lain, namun dilakukan penggalangan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan cara yang sesuai syariah.
- 6) **Profesionalisme**, dalam bekerja dilakukan dengan semangat kerja yang didasari pada keimanan, sehingga dalam bekerja tidak hanya mementingkan kehidupan dunia namun juga mementingkan kehidupan akhirat. Sehingga dalam bekerja tidak akan menyimpang dari prinsip yang digunakan yaitu syariah.
- 7) **Istiqomah**, dalam melakukan usaha tidak mudah putus asa, apabila telah mencapai hasil yang memuaskan akan terus meningkatkan usahanya dan terus bersyukur. Dan ketika hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai tujuan, maka akan terus berusaha tanpa putus asa.

#### b. Kegiatan BMT

##### 1) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana diperoleh dari nasabah yang mempercayakan dananya kepada BMT untuk disalurkan untuk pembiayaan/penyaluran produktif. Simpanan berbentuk produk tabungan wadiah, simpanan mudharabah jangka panjang dan pendek.

## 2) Penyaluran Dana

Penyaluran dana BMT ke masyarakat berupa pembiayaan dengan berbagai produk yaitu dengan prinsip jual beli (murabahah, bai salam dan bai isthisna), bagi hasil (musyarakah, mudharaah dan muzara'ah), berprinsip sewa (ijarah), dalam bidang jasa (al wakalah, al kafalah al hawalah dan ara ahn) dan untuk tujuan sosial yaitu Qardh/Qardhul hasan.

### c. Ciri-Ciri BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan perekonomian bagi anggotanya dan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah serta dalam usahanya berskala mikro.
- 2) Berperan dalam sosial, walaupun pada prinsipnya untuk keuntungan tetapi dalam mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dengan kegiatan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- 3) Dibangun dengan berlandaskan peran masyarakat yang sekitar yang berasal dari bawah, dengan ekonomi yang kecil yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar BMT.
- 4) Lembaga milik bersama, yaitu masyarakat sekitar yang tergolong dalam ekonomi rendah dan tinggi, bukan hanya dimiliki oleh perorangan dan orang luar dari daerah. Sehingga BMT adalah milik bersama dan bukan hanya dikelola oleh perseroan.<sup>22</sup>

Program pengentasan kemiskinan di Dinas sosial Bantul seperti program jamkes dan pelatihan-pelatihan serta penyuluhan. Di Dinas sosial pemerintah lebih menekankan ke program yang bentuknya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Berbeda

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal.9

dengan program yang ada di BMT yang sudah di arahkan dan terealisasikan contohnya seperti penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang di kelolah oleh lembaga dari BMT tersebut dan bantuan serta hadiah yang di berikan oleh pihak BMT kepada nasabah atau masyarakat miskin yang berada di sekitarnya.

Grameen Bank merupakan sebuah bank yang mengedepankan mikro kredit bagi masyarakat miskin di Bangladesh. Bank ini di pelopori oleh seorang dosen di Universitas Chittagong Bangladesh, beliau adalah Profesor Muhammad Yunus. Pendirian bank ini diawali atas kegelisahannya melihat kemiskinan yang tiada terselesaikan padanegaraanya tersebut, sehingga beliau berinisiatif untuk membuat sebuah langkah kongkrit dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan di negaranya. Pada tahun 1974 terjadi bencana kelaparan di Bangladesh, melihat permasalahan yang kian parah Profesor Muhammad Yunus langsung terjun kelapangan dan mencari solusi.

Tepat pada tahun 1976 Muhammad Yunus meluncurkan mikro kreditnya kepada masyarakat yang ada di Bangladesh, mikro kredit inilah yang juga merupakan asal usul terbentuknya Grameen Bank di Bangladesh. Grameen Bank Sendiri memiliki arti “Bank Desa” dalam bahasa Banlades.

Mikro kredit yang ditawarkan adalah mikro kredit yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, tanpa angunan atau bunga. Adapun tujuan dibentuknya program mikro kredit ini diantaranya adalah:

- a. mengeluarkan masyarakat dari lingkaran setan (kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran);
- b. memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin (pengemis, masyarakat miskin yang tidak berpenghasilan lengkap)

- c. menghapuskan eksploitasi orang kaya dalam memberi pinjaman kepada masyarakat miskin dengan bunga yang besar (lintah darat)
- d. menciptakan peluang kerja mandiri bagi masyarakat Bangladesh karena tingginya angka pengangguran disana.
- e. memberikan fasilitas perbankan kepada para perempuan.
- f. menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar beberapa prinsip operasional Grameen Bank dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk lebih memudahkan masyarakat miskin prosedur dan persyaratan pembiayaan dibuat sesederhana mungkin. Grameen Bank menggunakan strategi jemput bola, mulai dari proses pengajuan, pencairan serta pembayaran angsuran bisa dilakukan di tempat si nasabah.
- 2) Skema dan plafond pembiayaan serta jadwal angsuran dibuat sefleksibel mungkin, disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. bisadiangsur secara harian, mingguan atau bulanan.
- 3) Menerapkan konsep pembiayaan kelompok (*group lending*). Para calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan digabungkan kedalam sebuah kelompok. Kelompok ini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai sarana pembelajaran bersama para anggota, tempat untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kerjasama, serta memperkuat posisi tawar kelompok terhadap pihak lain. Sedangkan bagi pihak Grameen Bank sendiri, dengan terbentuknya kelompok, akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.
- 4) Sebagai salah satu instrumen pengamanan dalam pembiayaan, maka pihak Grameen Bank menerapkan aturan tanggung renteng di dalam kelompok.

Misalkan saja kalau dalam satu kelompok yang mengajukan pembiayaan terdiri dari 5 (lima) orang anggota, maka dalam proses pencairannya tidak akan langsung dilakukan secara sekaligus, tapi memakai mekanisme 2-2-1. Pada tahap pertama dua orang anggota kelompok dulu yang akan dicairkan, kemudian tahap berikutnya dua orang lagi, dan tahap terakhir satu orang. Biasanya penunjukan siapa yang akan mendapatkan pencairan tahap pertama dan tahap berikutnya merupakan hasil kesepakatan dari semua anggota kelompok. Biasanya ketua kelompok sebagai pemimpin akan mendapatkan jadwal terakhir pencairan pembiayaan. Kalau misalkan terdapat kemacetan pembayaran cicilan, maka proses pencairan pada tahap berikutnya akan ditunda terlebih dahulu, sampai kemudian kelompok bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan anggotanya.

- 5) Pihak Grameen Bank akan memberikan pendampingan secara terstruktur kepada kelompok nasabah dan secara periodik akan diberikan materi-materi yang bisa memperkuat karakter dan rasa percayaandiri, pemberian bimbingan teknis & keterampilan manajemen bisnis.
- 6) Untuk membantu masyarakat miskin agar suatu saat bisa mempunyai aset sendiri, maka pihak Grameen Bank akan mewajibkan kepada nasabahnya menabung. Bahkan bagi para yang usahanya terus berkembang diberikan kesempatan untuk membeli sebagian saham Grameen Bank.

Pada akhir tahun 2006, Grameen Bank membuktikan pada dunia, bahwa usaha yang mereka rintis dengan modal sendiri dengan menggerakkan sumber daya yang mereka miliki diakui dunia sebagai sebuah proyek memberantas kemiskinan. Atas prestasi tersebut, Muhammad Yunus memperoleh Nobel Perdamaian. Grameen Bank telah membantu tujuh juta orang miskin di 73 ribu desa Bangladesh menjadi pelaku usaha melalui pembiayaan mikro senilai empat milyar dolar dan membangun 640

ribu rumah bagi mereka. Di samping itu, dengan 1.181 cabang yang dimilikinya, Grameen Bank dapat membuka lapangan kerja bagi hampir 12 ribu staf mereka. Meskipun dengan bangkitnya rakyat miskin menjadi pelaku usaha di Bangladesh tidak serta-merta menjadikan Bangladesh sebagai negara kaya dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi mampu mengubah kualitas hidup 50 persen populasi terbawah sebagai hakikat pembangunan.

Grameen Bank telah mampu membuktikan bahwa masyarakat miskin mampu mandiri mengubah nasibnya dengan memberdayakan kemampuan artistik dan kreatif yang mereka miliki dalam merealisasikan kesejahteraan masing-masing. Bahkan sebagai negara yang sering dilanda bencana alam, para anggota Grameen Bank tetap mampu bangkit kembali setiap bencana berlalu dan dapat melunasi semua pembiayaan yang mereka terima setelah *recovery*. Sebuah pembangunan yang berhasil memang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Tak hanya pemerintah, namun sektor swasta maupun privat dan individu juga harus dilibatkan. Kebijakan pengentasan kemiskinan memang tidak hanya sekedar pemberian dana saja, terus pihak bank atau pemerintah lepas tangan. Namun, juga harus ada program tindaklanjut yang berupa pembinaan dan pemberdayaan agar usaha yang dirintis semakin berkembang dan lahirlah lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dapat berkurang.

Jika selama ini bank konvensional masih pilih kasih memberikan dananya hanya bagi pengusaha atau pemilik modal besar, sudah saatnya mengubah kebiasaan tersebut untuk tidak pilih kasih. Program mikro kredit yang digagas Muhammad Yunus tersebut juga sudah diadopsi oleh Indonesia melalui Bank Perkreditan Rakyat, Bank Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan/Pedesaan, serta telah diadopsi pula oleh bank-bank konvensional milik pemerintah seperti program

Kredit Usaha Rakyat, UMKM, Kredit Angkringan yang diprioritaskan bagi mereka yang berkecimpung di sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Namun di balik kesuksesan dari grameen bank tersebut ada beberapa catatan penting yang yang harus kita semua ketahui yaitu:

- a) Grameen Bank beroperasi secara tidak syariah karena masih menggunakan riba.
- b) Model kredit yang di Grameen Bank merupakan versi baru dari ekonomi feodal dalam konteks hubungan peminjam dan pemberi pinjaman
- c) Model oprasi kredit mikro di Grameen Bank didasari asumsi implicit konflik kelompok dan paradigma neoklasik ortodoks barat tentang ekonomi bebas nilai, yang cenderung pada upaya pemberdayaan wanita saja, karena 90 persen nasabah di Grameen Bank wanita.
- d) Grameen Bank berdiri atas landasan hukum yang berbeda di bandingkan usaha perbankan pada umumnya.
- e) Grameen Bank juga mendapat fasilitas bebas pajak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Merza Gamal&Muhammad Asep Zaelani, “KeberhasilanGrameen Bank& Bantuan Menyengsarakan”,2013, *Jurnal*, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/01/31/keberhasilan-grameen-bank-bantuan-menyengsarakan-524391.html>). diakses 20 Oktober 2014.

